

**EKSISTENSI OLIGARKI DALAM NEGARA DEMOKRASI
PERSPEKTIF FIKIH *SIYĀSAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
MIFTAHOL FAJAR SODIK, SH.
19203012013**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING
Prof. Dr. H. KAMSI, M.A.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

Abstrak

Monopoli kekuasaan oleh sekelompok kecil tidak jarang menimbulkan ketidakadilan, kesewenang-wenangan bahkan pembatasan hak politik terhadap masyarakat sehingga hal demikian semakin mengkaburkan arti demokrasi sebagai kekuasaan dan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Eksistensi oligarki politik cenderung menjadikan demokrasi bergerak dalam abstraksi semu dan tidak bernilai sebagai manifestasi kekuasaan rakyat secara substansial. Oligarki politik mendistorsi demokrasi, akhirnya demokrasi berada pada variabel terpengaruh dan terkalahkan oleh kekuatan oligarki. Keterangan tersebut menjadi alasan dan memicu semangat fikih *siyāsah* untuk menjelaskan apa dan bagaimana politik dalam arti mengurus dan menjalankan negara baik dilihat dari segi pelayanan birokrasi, penegakan hukum dan kebijakan politik serta tujuan utama membentuk organisasi besar yang bernama negara. Dalam perspektif fikih *siyāsah* menjelaskan bahwa sikap politik harus mengarah dan diarahkan untuk mencapai kemaslahatan terhadap pemeliharaan agama dan kehidupan masyarakat dalam suatu negara. secara garis besar harapan fikih *siyāsah* yaitu membentuk pola hubungan pemimpin dan rakyat yang harmonis, berkeadilan dan mencapai puncak kesejahteraan sesuai dengan syariat Islam. Maka fikih *siyāsah* erat hubungannya dengan etika berkuasa dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai pemimpin serta untuk menciptakan politik yang memiliki orientasi *rahmatan lil ‘ālamīn*. Perspektif fikih *siyāsah* memahami politik sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dalam arti yang paling dalam, oleh sebab itu maka segala bentuk kerusakan tertolak sehingga segala kecenderungan untuk itu batal dan tidak dapat diakui.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan suatu pendekatan diskriptif yang mengacu pada suatu perspektif normatif terhadap realitas oligarki politik dalam negara demokrasi. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif normatif yang menghasilkan sudut pandang tertentu dalam kajian fikih *siyāsah*. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data-data sekunder, di samping itu terkait teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fikih *siyāsah* yang fokus pada *siyāsah idāriyah* dan etika politik Islam.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa oligarki politik dalam konsep negara demokrasi dapat menyebabkan *post* demokrasi dan belum mencerminkan pemerintahan sebagai abdi rakyat dalam ruang lingkup politik yang lebih luas. Eksistensi politik sebagai sarana yang menghendaki kemaslahatan dan menolak segala kerusakan hidup bernegara belum tampak dalam aspek pemerintahan birokrasi secara khusus maupun politik praktis dalam pengertian yang lebih luas. Prinsip tolong-menolong, berlomba-lomba dalam kebaikan, bermusyawarah, mengedepankan persamaan hak dan keadilan secara umum belum tampak dalam potret oligarki politik sehingga yang demikian dapat dikatakan sebagai sikap politik yang tidak baik tidak tampak memiliki nilai moralitas dan tidak dapat diakui sebagai politik yang berdiri diatas dasar-dasar ajaran Islam.

Kata kunci: Oligarki politik, demokrasi, fikih *siyāsah*.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1234/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI OLIGARKI DALAM NEGARA DEMOKRASI PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTAHOL FAJAR SODIK, SH
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012013
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. H. Kamwi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 612a679d8b-02



Penguji II
Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c189451-des



Penguji III
Dr. Oektoberinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c94d201ar6ef



Yogyakarta, 21 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 612a697d82206

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Pascasarjana Hukum Islam
Fak. Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah tesis berjudul:

**Eksistensi Oligarki Politik
Dalam Konsep Negara Demokrasi Prespektif Fikih Siyāṣah**


yang ditulis oleh:

Nama : Miftahol Fajar Sodik, S.H
NIM : 19203012013
Program/ Prodi : Pascasarjana(S2) Hukum Islam
Konsentrasi : HTN

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Pascasarjana Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Noven ber 2021
Pembimbing,


Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahol Fajar Sodik S.H.

NIM : 19203012013

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Desember 2021

Saya yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


MIFTAHO FAJAR SODIK, S.H.
NIM. 19203012013

MOTTO

Sesungguhnya, kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan, dan barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allah lah tempat meminta segala hal.

(Abu Hamid al-Ghazali)

Fiat justitia ruat caelum

“Sekalipun esok hari langit akan runtuh dan dunia akan musnah, walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan tetap ditegakkan”.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT, akhirnya karya tesis ini dapat terselesaikan walaupun masih menyisakan perjalanan yang panjang dalam menuntut karir sebagai akademisi, maka Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua Aba (Abu Siha) dan Umi (Sri Mubarakatin) yang selalu menyertai doa dan dukungan dalam setiap perjuangan pada saat menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Saudara kandung saya Lailu Nazilur Rohman yang saat ini masih dalam proses menempuh pendidikan di pesantren Modern Al-Azhar Bahaudin Sumenep dan tidak lupa kepada keluarga besar bani Kasdi, saudara sepupu Ansori Yanto, Cicik Gamiarsih Agustin, Amaliatun Naili, afif, Adi, Rifki beserta istriya Zulfa, Ismawati dan Faisal Rimzani, Rajib, Khosairi, Habib, Sahriyah, mbak Sun dan Rosul, tidak lupa juga kepada keponakan saya Kafa, Raka, Lisa, Rahman, Devi, Simah, Dani, Afi, Tifah dan Nor, juga tidak lupa kepada kakak saya Moh. Farid MA yang telah banyak membantu dan menemani mulai dari proses pendaftaran dan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Adapun kakak dan adik dalam keluarga besar Bani Kasdi yang tidak dapat dilewatkan adalah Sifah Sum, Salim, Tarisa, Faridah, Tanzil dan Hasanah, mereka semua merupakan penyemangat bagi diri saya sehingga Tesis ini dirasa kurang lengkap tanpa penyebutan nama mereka di halaman persembahan ini.
3. Para Guru yang saya khususkan kepada (Almarhum) KH. Bahaudin Mudhary, KH. Ariskul Fikri Bahaudin, KH. Asrori Hermani Bahaudin, Ny. Hj. Waty Noer, K.H. Syaifurrahman Nawawi, KH. Sufyan Nawawi, beserta keluarga besar pendiri KMI Pesantren Modern Al-Azhar Bahaudin dan Pondok Pesantren Nurul Huda

Pakandangan Barat. Kemudian dengan rasa hormat khususnya kepada tenaga pengajar konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Dr. H. Ahmad Bahiej, SH, M.Hum, M.Si, Dr. H. M. Nur, M.Ag, Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag, Dr. Hj. Siti Fatimah, SH, M.Hum, Dr. Ali Sodikin, M.Ag, Dr. Ocktoberinsyah, M. Ag, Dr. H. Oman Fathurrahman, M.Ag, Prof. Dr. H. Kamsi, MA dan secara umum kepada seluruh dosen di lingkungan fakultas syari'ah dan hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

4. Pembimbing tesis yaitu Prof. Dr. H. Kamsi, MA yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam penulisan tesis ini, sehingga dengan penuh kesadaran bahwa karya tulis ini selayaknya berhutang budi kepada beliau dan akhirnya saya sampaikan terima kasih, mudah-mudahan kesehatan, keberkahan dan kelancaran rezeki menyertai Prof. Dr. H. Kamsi, MA beserta keluarga besarnya.
5. Teman-teman saya, khususnya Hakiki yang telah banyak membantu saya dalam banyak hal dan teman-teman se almamater di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya keluarga besar Hukum Tata Negara yang selalu menjadi tempat berdialog untuk membahas isu-isu hukum dan seputar tentang hukum tata negara kontemporer.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-ma zāhib*

IV. Vokal Pendek

◌ِ	kasrah	ditulis	i
◌َ	fathah	ditulis	a
◌ُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	\bar{A}
إستحسان	Ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2. Fath}ah} + ya' mati	Ditulis	\bar{A}
أنثى		<i>Unṣā</i>
3. Kasrah + yā' mati	Ditulis	\bar{I}
العلواني		<i>al-‘Ālwānī</i>
4. Dammah + wāwu mati	Ditulis	\bar{U}
علوم		<i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya" mati	Ditulis	Ai
غيرهم	Ditulis	<i>Gairihim</i>
2. Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dalam Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدة	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	al-Qur'an
الدليل	Ditulis	al-Dalil

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risalah
النساء	Ditulis	an-Nisa"

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	ditulis	Ahl al-Ra'yi
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian tesis sebagai salah satu syarat menyelesaikan program magister dapat terselesaikan dengan lancar. Amin.

Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan *rahmatan lil 'alamin*. Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengetahuan dan pengalaman. Sehingga kesempurnaan tesis ini penulis katakan sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena kesempurnaan adalah milik Allah SWT. Oleh sebab itu, maka segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis dengan demikian maka saran dan kritik yang membangun sangatlah diharapkan. Adapun keberhasilan dan terselesaikannya tulisan ini tidak dapat lepas dari dukungan banyak pihak, terutama dosen pembimbing yaitu Prof. Dr. H. Kamsi, MA dan segenapa civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: .

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024), semoga diberikan kemudahan dalam membawa perubahan dan kemajuan bagi kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. “UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia”.

2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024). Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016-2020).

5. Bapak Dr. Abdul Mughits, M.Ag selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah, dan Dr. Mansur selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syariah (2020-2024). Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah, dan Bapak Dr. H. Fathorrahman, M.Si selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syariah (2016-2020), serta para staf yang berkhidmah di fakultas syariah dan hukum.

6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum tatanegara yang telah banyak mengalirkan ilmu, pengetahuan dan pengalaman selama berada di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A selaku Dosen Pembimbing tesis yang terus memberikan arahan, saran dan kritikan dalam penulisan tesis ini sehingga bagi penulis beliau tidak hanya sebagai dosen namun selaknya orang tua yang selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya.

8. Staf Perpustakaan baik bagian akademik dan bagian administrasi yang telah meluangkan waktu untuk melayani kebutuhan penulis sehingga walaupun dalam keadaan pandemi covid 19 namun integritas serta profesionalitasnya sebagai pelayan di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga perlu di acungkan ibu jari sebagai bentuk apresiasi.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik.

Yogyakarta, 15 November 2021

Penulis



Miftahol Fajar Sodik, S.H
NIM. 19203012013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Karangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI FIKIH <i>SIYĀSAH</i> DAN ETIKA POLITIK ISLAM	
A. Konsep teoritis <i>siyāсах idāriyah</i>	
1. Pengertian dan kajian <i>siyāсах idāriyah</i>	20
2. Kaidah-kaidah dalam <i>siyāсах idāriyah</i>	26
3. Konsep pemeliharaan umat (<i>Hifzu al-Ummah</i>) dalam <i>siyāсах idāriyah</i>	33
B. Kajian Teori Etika Politik Islam	
1. Pengertian etika politik	40
2. Etika pemerintahan dalam Islam	44
3. Prinsip politik dalam Islam	49

**BAB III DATA OBJEK DAN FOKUS PENELITIAN : TEORI OLIGARKI,
DAN DEMOKRASI INDONESIA**

A. Oligarki dalam sudut pandang teori	53
B. Tipe-tipe oligarki menurut Jeffry Winters	56
C. Demokrasi di Indonesia	62
D. Implikasi oligark dan oligarki dalam demokrasi	70

**BAB IV PEMBAHASAN : EKSISTENSI OLIGARKI DALAM
NEGARA DEMOKRASI PERSPEKTIF FIKIH *SIYĀSAH***

A. Potret eksistensi oligarki politik di beberapa daerah dalam konteks negara demokrasi di Indonesia	81
B. Eksistensi oligarki politik dalam perspektif fikih <i>siyāsh</i> dan etika politik Islam	
1. Oligarki politik dalam perespektif <i>siyāsh idāriyah</i>	91
2. Oligarki politik perespektif etika politik Islam	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	113
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	126

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki sistem pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Hal itu mempunyai konsekuensi bahwa segala urusan pemerintahan dilakukan sebesar-besarnya untuk memajukan rakyatnya. Konsep semacam ini dikenal dengan negara demokrasi. Dalam bentuk demokrasi kekuasaan ada di tangan rakyat sehingga kepentingan rakyat (kepentingan umum) lebih diutamakan.¹ Hal itu menjelaskan bahwa segala urusan politik sepenuhnya diarahkan untuk menggambarkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dan kekuasaan timbul karena adanya kepercayaan terhadap seseorang yang ditunjuk untuk memerintah.

Terkait sistem demokrasi beberapa ulama berbeda pandangan tentang hal tersebut. Adapun diantara ulama muslim (cenderung konservatif) yang menolak demokrasi adalah Syekh Fadhallah Nuri, Thabathabai dari Iran, Sayyid Quthb dan al-Sya'rawi dari Mesir, serta Ali Benhadj dari Aljazair,² bahkan Taqiyyudin an-Nabani dan muridnya Abdul Qadim Zallum hanya membenarkan khilafah dari pada bentuk negara-negara yang ada saat ini.³ Sedangkan di Indonesia sendiri tokoh pemikir muslim yang menerima demokrasi adalah Fahmi Huwaidi, Nurcholis Majid, Muhammad Husein Haikal dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ahmad Syafi'i Ma'arif,⁴ bahkan Abul'ala Al-Maududi berpendapat bahwa demokrasi dan Islam memiliki kemiripan pada

¹ Max Boli Sabon dkk., *Ilmu Negara: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 167.

² Syukron Kamil, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Historis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 47

³ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa M. Maghfur Wachid, cet ke-1 (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2019) hlm. 25-30

⁴ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Civil Education Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Cet. Ke-8 (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan Prenada Media Group, 2015), hlm. 85

wawasan diantara keduanya.⁵ Oleh sebab itu maka hingga saat ini Indonesia tampil sebagai negara demokrasi dengan mayoritas penduduk muslim yang dominan.

Salah satu konsekuensi dari konsep negara yang demokrasi yaitu bagaimana menciptakan suatu pemerintahan yang adil dan menjunjung tinggi persamaan di dalam hukum (*equality before the law*). Segala proses politik yang dilakukan harus mencerminkan rasa kedaulatan rakyat sebagaimana pemerintah dipilih berdasarkan suara rakyat dan bertugas mensejahterakan rakyatnya, namun tampaknya pilihan demokrasi belum mampu mensterilisasikan dari praktik-praktik oligarkis di negara Indonesia. Sebagaimana pernyataan Jeffrey A. Winters dalam presentasinya bahwa

Struggles throughout history show us that there is a powerful and persistent human desire for freedom, justice, and equality. But history also reveals that human societies remain gripped by profound and durable inequalities, patterns of exclusion, and especially a capacity of small groups (oligarchs and elites) to benefit themselves as they dominate everyone else.⁶

Seperti halnya di Philipina dan Thailand praktik oligarki dalam berpolitik ini tidak banyak memunculkan perlawanan sosial dari kekuatan masyarakat, kecuali adanya gesekan politik antar sesama oligark dalam perebutan sumber daya daerah.⁷ Pertarungan para oligark seakan telah jauh dari kenyataan hidup sebagai manusia yang sejatinya berbuat yang terbaik dalam hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Dengan mempertahankan sumber materialismenya menunjukkan arti hidup sebatas untuk kejayaan individu maupun kelompoknya tanpa berfikir bahwa keberadaan masyarakat disekitarnya membutuhkan hak ekonomi dan politik yang lebih demokratis demi terwujudkan kesejahteraan dalam tata hidup berbangsa dan bernegara.

⁵ Syukron Kamil, *Islam & Demokrasi*...., hlm. 49

⁶ Jeffrey A. Winters, "Reflections On Oligarchy, Democracy, And The Rule Of Law In Indonesia," a lecture presented at the open senate meeting on the occasion of the seventy-fifth anniversary of the gadjah mada university school of law, 17 February 2021. hlm.1

⁷ Abdur Rozaki, *Proceeding Of The 16th Annual International Conference On Islamic Studies (Aicis)*, IAIN Raden Intan Lampung (November 1-4, 2016), hlm.185.

Kekuasaan oligarki pada perkembangannya dapat membentuk kekuatan dinasti politik yang sangat kuat. Eksistensi oligarki politik yang bermain dalam demokrasi elektoral akan menyebabkan terjadinya *post-democracy* dalam sistem ketata negaraan. Dalam kondisi tersebut terdapat beberapa kecenderungan. *Pertama*, keterlibatan masyarakat dalam politik bersifat terbatas atau artifisial saja kedua, partai bukan lagi sebagai sarana penyalur kepentingan rakyat ketiga terdapat kecenderungan menggunakan cara-cara populisme dan artifisial (*post-truth*) dalam berpolitik *keempat*, antusiasme berpolitik masyarakat menurun *kelima*, hilangnya penghormatan terhadap institusi, proses dan nilai demokrasi.⁸

Menjadi suatu fakta bahwa jalannya pemerintahan dalam suatu negara yang demokratis pada praktiknya cenderung disinyalir oleh eksistensi politik yang bertumpu pada kekuasaan sekelompok orang yang memiliki kepentingan materialisme dalam tata pemerintahan. Seperti halnya di era orde baru, bentuk kekuasaan para oligark nampak begitu jelas sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung terisolasi. Peran dan fungsi sebagai pemerintah yang seharusnya ditujukan untuk mengangkat perekonomian masyarakat justru menyimpang dan cenderung mempertahankan sumber daya kekayaan para oligark. Hal itu disebabkan karena, pemegang otoritas kebijakan ekonomi pada masa orde baru diisi oleh orang-orang yang dibina oleh pemerintahan Amerika Serikat dan para penguasa kebijakan ini kemudian dikenal dengan sebutan mafia berkeley.⁹ Hal ini menandakan bahwa oligarki politik di Indonesia terjadi dan disebabkan oleh eksistensinya dengan lembaga pemerintahan yang akhirnya membentuk suatu kekuatan

⁸ Siti Hasanah, "Kondisi Hukum Tata Negara 2020: Surplus Oligarki, Defisit Demokrasi" Makalah disampaikan pada webinar refleksi akhir tahun, diselenggarakan oleh Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (Mahutama), 28 Desember 2020.

⁹ Wisnu HKP Notanagoro, *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia: IMF, World bank, WTO, Sumber Bencana Ekonomi Bangsa*, (Sekretariat Jenderal Gerakan Kebangsaan Rakyat Semesta, 2011), hlm. 41.

di jaringan pemerintah. Bahkan di tingkat lokalpun keberadaan oligark seakan menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri sehingga dapat dikatakan praktik para oligark cenderung hanya mencerminkan konsep kekuasaan rakyat sebagai bahan selogan yang secara substansial menyimpang dari makna demokrasi karena para oligark yang berada dalam tubuh pemerintahan justru dijalankan untuk memperkaya dirinya. Sebagaimana penelitian Jeffry Winters seorang profesor ilmu politik direktur pengembangan kesetaraan dan program studi globalisasi (EDGS) Universitas Northwestern Chicago, Amerika Serikat menyebutkan, keadaan Indonesia yang sering disalahtafsirkan sebagai masalah kualitas demokrasi, berupa munculnya demokrasi kriminal dimana para oligark menggunakan kekayaan mereka untuk bersaing secara tidak adil untuk mendapatkan jabatan dan mengalahkan hukum ketika bermasalah akibat korupsi atau bencana.¹⁰

Maka salah satu tuntutan gerakan reformasi diharapkan dapat mengembalikan makna demokrasi yang lebih tampak dirasakan oleh masyarakat dan bukan sekedar konsep teoritis. Namun pergulatan politik di tingkat nasional maupun lokal seakan belum bisa menghendaki hal itu karena pada praktiknya yang ada hanyalah bagaimana cara mempolitisasi makna demokrasi dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan dirinya. Di tingkat nasional misalnya (pasca reformasi), kecenderungan oligarki dapat dilihat di saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam hal pengambilan kebijakan ekonomi. Sebagaimana dikatakan oleh Wisnu HKP Notanagoro bahwa, kebijakan yang telah diambil oleh tim ekonomi Presiden Yhudoyono tidak berpihak pada rakyat, bahkan tidak mengabdikan pada kepentingan rakyat, hal itu disebabkan oleh tim ekonomi yang didominasi oleh kepentingan pengusaha dan

¹⁰ Jeffry A. Winters, *Oligarki*, alih bahasa Zia Ansor, (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. xx

kepentingan internasional. Eksistensi para oligark di era tersebut seakan masih belum hilang dan ingin terus mempertahankan sumber daya kekayaannya di dalam suatu sistem negara yang demokratis.

Begitu pula dalam konteks pemerintahan di tingkat daerah. Seperti halnya oligarki di Provinsi Banten yang mana keluarga jawara menguasai unsur-unsur bisnis dan politik sehingga mendapatkan kekuasaan eksekutif mulai tingkat provinsi hingga Kabupaten dan Kota.¹¹ Potensi tersebut tampak pada dominasi Chasan Sohib dalam mendominasi jalannya proses pemilihan gubernur pada waktu itu setelah menjadi gubernur pengganti, pada 2006 Ratu Atut terpilih sebagai Gubernur didampingi Masduki.¹²

Hal ini dapat dijelaskan bahwa eksistensi oligark dalam konsep negara demokrasi merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihelakkan. Munculnya oligarki di Banten disebabkan oleh kuatnya legitimasi tradisional yang diberikan masyarakat kepada sosok *local strongman* sebagai subjek yang menguasai ruang tradisionalitas. Sumber daya material (modal kapital) dan nonmaterial (modal sosial) mendukung terbentuknya akumulasi kekuasaan oligarkis di Banten.¹³ Bahkan di daerah Mamuju Tengah kontestasi pemilihan umum pada tahun 2015 diwarnai dengan politik patron-klien yang mengantarkan Aras Tamauni dan Muh. Amin Jasa memenangkan pemilihan kepala daerah.¹⁴

Keterangan tersebut terlihat bahwa oligark dapat tampil secara langsung dalam suatu lembaga pemerintahan dan juga dapat pula mejadi penguasa yang berperan di balik layar dengan kekuatan sumber daya materialnya (petronasi). Artinya terjadi suatu

¹¹ Ahmad Munjin, "Oligarki dan Demokmrasi: Kajian Sumber Daya Kekuasaan Kiai Dan Jawara di Banten," Tesis pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah (2018), hlm. 8

¹² <https://www.kompasiana.com> diakses pada tanggal 23 Desember 2021

¹³ Ahmad Munjin, "Oligarki dan Demokmrasi", hlm. 8

¹⁴ Nur Aliyah Zainal dan Ibnu Khaldun, "Local Strongman dan Kontestasi Politik: Studi Kasus Terhadap Kemenangan Fenomenal Aras Tammauni dan Muh. Amin Jasa Pada Pilkada Mamuju Tengah," *Jurnal Sulesana*, Vol. 1:1 (Januari 2017), hlm. 47.

keadaan yang mana proses pelaksanaan pemilihan umum bergeser pada sistem demokrasi elektoral dengan bersumber pada kekuatan kapitalis serta para oligark dapat menunjuk para calon pemimpin yang nantinya dipilih oleh rakyat dan pada akhirnya yang diuntungkan adalah para oligark yang mempunyai kepentingan.

Pragmatisme politik menyebabkan sendi-sendi dalam sistem pemerintahan menjadi lemah sehingga bukan suatu kemustahilan suatu saat nanti akan terjadi hirarki sosial dalam hidup bernegara jika oligarki tidak diimbangi oleh entitas yang dapat meredam eksistensinya di negara demokrasi. Maka setidaknya agama yang mejadi basis keyakinan masyarakat perlu ditekankan dan direfleksikan sehingga para oligark dapat menempatkan diri pada suatu keadaan yang ideal dalam hidup berbangsa dan bernegara berperan sebagai solusi atas segala persoalan dalam membangun cita-cita kesejahteraan.

Dalam konteks inilah refleksi politik dalam ajaran agama Islam sangat menarik untuk dikaji terhadap eksistensi oligarki politik dalam konteks negara demokrasi sehingga nantinya mampu meresapi dan menumbuhkan semangat keIslaman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Diketahui bahwa Islam mengenal dan memberikan arahan politik yang di dikaji dalam bidang *siyāsah* yang membahas tentang hubungan pemimpin dan rakyatnya dengan bersumber dari ajaran *syari'at* (sumber hukum Islam). Dalam *siyāsah* semua aktivitas politik diarahkan untuk tujuan mencapai kemaslahatan¹⁵. Oleh sebab itu potret oligarkis yang terjadi nantinya akan di kaji dari perspektif pemerintahan ataupun politik dalam Islam (fikih *siyāsah*) dan kajian etika politik islam yang menilai baik dan buruknya suatu tindakan berpolitik yang kesemuanya itu merupakan bagian dari kajian fikih *siyāsah*.

¹⁵ Moh. Fuazan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 400

B. Rumusan Masalah

Eksistensi oligarki dalam negara demokrasi memunculkan pragmatisme dalam berpolitik. Semangat politik yang seyogyanya diorientasikan terhadap kesejahteraan umum justru terbalik yang semula politik merupakan sarana membangun bangsa dan negara untuk menggapai cita-cita mulia digiring ke arah kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Sistem demokrasi yang menghendaki persamaan politik, kebebasan dan keadilan justru dipermainkan dalam kontestasi politik elektoral bahkan demokrasi dijadikan bingkai yang dibumbui oleh tatanan politik oligarkis sehingga demokrasi yang awalnya adalah seruan mayoritas tergantikan oleh seruan minoritas yang oligarkis. Adapun supresmasi hukum belum dapat memberikan implikasi efektif terhadap tatanan politik oligarki, karena hukum sebatas alat negara sedangkan politik yang dilakukan oleh para oligark merupakan subjek hukum yang bisa bertindak membuat hukum dan menjalankannya, sehingga atas dasar inilah penelitian ini mencoba merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana potret eksistensi oligarki yang terjadi di beberapa daerah dalam konteks negara demokrasi Indonesia ?
2. Bagaimana perspektif fikih *siyāṣah* dan etika politik Islam berkenaan dengan eksistensi oligarki dalam konteks negara demokrasi ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan
 - a. Untuk mendeskripsikan eksistensi oligarki yang terjadi di beberapa daerah dalam konteks negara demokrasi di Indonesia.

- b. Untuk menjelaskan oligarki dalam negara demokrasi berdasarkan perspektif fikih *siyāsah* dan etika politik Islam.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berupa kontribusi ilmiah dalam kajian politik hukum secara khusus dan hukum tata negara secara umum. Hasil penelitian ini merupakan sumbangan pikiran terkait problematika sosial di bidang politik secara umum yang dikaji dalam pandangan agama Islam yang dibahas secara kompleks di bidang fikih *siyāsah*.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap lembaga pemerintahan secara umum tentang apa dan bagaimana sistem nilai yang seharusnya dibangun dalam konteks negara demokrasi. Secara aksiologi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran politik dalam hidup berbangsa dan bernegara .

D. Studi Pustaka

Kajian pustaka dilakukan untuk mengetahui dimana letak perbedaan maupun persamaan penelitian. Adapun penelusuran yang telah dilakukan, ternyata ditemukan beberapa karya yang memiliki kemiripan dalam bentuk tesis, jurnal dan disertasi antara lain :

No	Nama Penulis	Judul Artikel	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fitri Kumala, Rahmayuni Fitri Ariska, Silfira Dinata	Oligarki Dalam Demoksari Indonesia Membuat Hukum Sulit Di Tegakkan	Bagaimana perbandingan antara oligarki sekarang dan pada masa orde baru? Apa dampak bahaya dari	Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan	Orde baru di pandang jauh lebih baik dari pada keadaan pada masa reformasi. Khususnya di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono menampakkan bahwa betapa mereka yang kaya semakin kaya, namun mereka yang

			oligarki ? Apa pengaruh oligarki terhadap demokrasi ?	sosiologis	miskin tidak berdaya, sehingga demokrasi yang mengarah ke oligarki kekuasaan barimplikasi pada ketidak setaraan, kebijakan yang berpihak pada sekelompok orang dan lemahnya penegakkan hukum. ¹⁶
2.	Endik Hidayat, Budi Prasetyo, Setya Yuwana	Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri	Bagaimana oligarki dan kultur dalam pemilihan umum di Indonesia ? Bagaimana praktik oligarki dalam pilkades di Desa Tanjung	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif empiris dengan metode pendekatan sosiologis	semua calon kepala desa menggunakan sumber daya material selain sumber kekuasaan Jawa yang bersifat spiritual. Penggunaan uang dan penguasaan institusi formal sebagai karakter dasar oligarki ternyata kurang efektif untuk meraup jumlah suara yang signifikan dalam pemilihan kepala desa Tanjung kabupaten kediri. ¹⁷
3.	Fajar Kuala Nugraha	Pemilukada: Menguatnya Politik Oligarki Lombok Timur Tahun 2013	Bagaimana kemunculan oligark di Lombok Timur? Bagaimana calon perseorangan yang notabene oligark mampu menang dalam Pemilukada Lombok timur tahun	Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif empiris dengan metode pendekatan sosiologi hukum	Kemunculan oligark di lombok timur diperkuat dengan masuknya Ali BD dan Khaerul Warisin (Alkhaer) sebagai pengusaha paling berpengaruh di daerah tersebut sehingga pada pemilukada 2013 Khaerul Warisin (Alkhaer) tampil sebagai pemenang mengungguli pasangan lain dari gabungan koalisi partai politik. Khaerul Warisin (Alkhaer) menggunakan sumber daya material sebagai modal utama oligark serta kekuasaan mobilisasi

¹⁶ Fitri Kumala dkk., "Oligarki Dalam Demoksari Indonesia Membuat Hukum Sulit Di Tegakkan", *Jurnal Syntax Fusion*, Vol. 1:2 (Februari 2021), hlm. 40-47.

¹⁷ Endik Hidayat, Budi Prasetyo, "Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent Pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri, *Jurnal Politik*, Vol. 4:1 (Agustus 2018), hlm.54

			2013		dalam kontestasi pemilihan. ¹⁸
4.	Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu	Desentralisasi dan Oligarki Predator Di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu Dalam Pembangunan Perdesaan	Seperti apa profil dan sumber daya kekuasaan kelompok oligarki di Wakatobi? Apa dampak yang ditimbulkan dari praktek oligarki terhadap pembangunan perdesaan?	Penelitian kualitatif empiris dengan metode pendekatan fenomenologi	lengsernya orde baru yang otoriter menuju pemerintahan yang demokratis tidak diikuti dengan runtuhnya para oligark. Terbentuknya kekuatan oligarki di Wakatobi tidak terlepas dari peran mosega yang mendasarkan pada kekuatan spritual dan pandai berkelahi. Profil dan sumber daya kekuasaan kelompok oligarki di Wakatobi adalah mereka yang memiliki keahlian dibidang birokrat, aktivis dan kepemilikan kekayaan superior. sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan dan konflik lahan antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha. ¹⁹
5.	Mohammad Ali Andrias	Oligarki dan Praktik Rent Seeking Pasca Pemekaran Tasikmalaya	Bagaimana praktik rente proyek pembangun infrastruktur publik dan eksplorasi pertambangan galian C ? Bagaimana konflik politik perebutan aset negara di Tasikmalaya	Penelitian kualitatif dengan metode pendekatan kolektif atau majemuk kasus	bahwa pemekaran wilayah di Tasikmalaya membuka peluang bagi elit-elit lokal, terutama bagi pelaku bisnis untuk mengakumulasi sumber daya materialnya sebagai akibat relasi politik antara pemangku kebijakan dan pembisnis. Praktik pemburu rente dan aktivitas oligarki dalam politik lokal dijalankan oleh penguasa (<i>goverment</i>) yang mempunyai kepentingan dalam jaringan bisnis politik yang pada akhirnya menimbulkan konflik politik dan keadaan yang mengacu pada pertahanan dan

¹⁸ Fajar Kuala Nugraha, "Pemilukada: Menguatnya Politik Oligarki Lombok Timur Tahun 2013", *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, Vol 1: 2 (November 2014), hlm.1-15

¹⁹ Eka Suaib dkk., "Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu Dalam Pembangunan Perdesaan", *Jurnal Penelitian Politik (LIPI)*, Vol. 13:2 (Desember 2016), hlm.167-191

					pengembangan sumber kekayaan material. ²⁰
6.	Dicky Dwi Ananta	Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014	Bagaimana eksistensi oligarki dalam perampasan tanah Kabupaten Karawang ?	Penelitian kualitatif dengan metode pendekatan fenomenologi	penelitian menunjukkan bahwa oligarki politik masih menjadi bentuk dan cara kerja dari politik lokal Indonesia, setidaknya indikasi tersebut terlihat dari operasionalisasi oligarki tersebut dari kasus perampasan tanah di Karawang. ²¹ Karakter dasar dari politik oligarki terletak pada kemampuan jejaring kekuasaan yang menggunakan lembaga negara untuk akumulasi kekayaan dan kekuasaan sosial secara individu.
7.	Herri Junius Nge	Oligarki Partai politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah : Sudi Kasus Munculnya Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017	Apa faktor yang menyebabkan oligarki parpol dalam penentuan calon kepala daerah yang berdampak munculnya calon tunggal pada pemilihan kepala Kabupaten Landak tahun 2017 ?	Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan sosiologi hukum	Oligarki partai dalam proses pengambilan keputusan calon Kepala Daerah, bertolak belakang dengan peran partai politik sebagai pilar demokrasi. Adapun timbulnya oligarki partai yang berdampak terhadap munculnya calon tunggal disebabkan <i>pertama</i> : DPP merupakan struktur tertinggi sehingga tampil sebagai penentu, <i>kedua</i> : peran jabatan resmi di tingkat pusat, <i>ketiga</i> : kekuasaan pemaksaan, <i>keempat</i> : kekuasaan mobilisasi dan <i>kelima</i> : kekuasaan material. ²²
8.	Vellayati Hajad	Oligark Sebagai Rent Seeker:	Bagaimana peran pengusaha	penelitian deskriptif kualitatif	Kemunculan oligark di Kabupaten Aceh Barat diawali koneksi kuat antara

²⁰ Mohammad Ali Andrias, "Oligarki dan Praktik Rent Seeking Pasca Pemekaran Tasikmalaya , *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol 5: 01, hlm. 43-79

²¹ Dicky Dwi Ananta, "Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014", *Jurnal Politik*, Vol. 2:1 (Agustus 2016), hlm.130.

²² Herri Junius Nge, "Oligarki Partai politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah : Sudi Kasus Munculnya Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017", *Jurnal Academia Praja*, Vol. 1:1 (Februari 2018), hlm, 1-26

		Haruskah ?	terhadap dinamika politik di Kabupaten Aceh Barat ? Bagaimana kemunculan oligark di Kabupaten Aceh Barat ?	dengan metode pendekatan fenomenologi	pengusaha dan calon Bupati yang memberikan keleluasaan kepada pengusaha (oligark) untuk bermain dan mencari kesempatan rente setelah proses pemilihan Bupati. ²³ Pemburu rente mencoba mengembangkan dan mempertahankan sumber daya materialnya dengan menjalin hubungan politik (patron-klien) dan intervensi atas kebijakan dalam sistem demokrasi elektoral.
9.	Javed Noorani	Oligarki pertambangan yang muncul di Afghanistan	Bagaimana peristiwa oligarki pertambangan yang terjadi di Afganista ?	Penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum	Pembangunan di Afghanistan tentang seputar sektor pertambangan seolah-olah untuk mencegah pengambilalihan sumber daya negara yang kaya oleh investor swasta asing dan sebagai gantinya memberikan peluang untuk bisnis Afghanistan. ²⁴ Ketersediaan sumber daya mineral yang mudah dieksploitasi telah menyebabkan elit politik dan institusi pemerintah yang lemah dan korup, akhirnya para elit menggunakan lembaga negara untuk mendistribusikan rente sumber daya di antara mereka sendiri dan para klien.
10.	Abdur Rozaki	Islam, Demokrasi dan Orang Kuat Lokal : Studi Kemunculan Oligarki	Bagaimana orang kuat lokal di Bangkalan membangun oligarki politik di	Penelitian empiris kualitatif dengan pendekatan antropologis, sosiologis	munculnya oligarki di Kabupaten Bangkalan disebabkan oleh bergulirnya disentralisasi dan otonomi daerah pasca runtuhnya rezim Suharto. Pada kesempatan tersebut orang

²³ Vellayati Hajad, "Oligark Sebagai Rent Seeker: Haruskah ?", *Jurnal Public Policy*, Vol 3:1 (November 2017), hlm.36.

²⁴ Javed Noorani, "Afghanistan's Emerging Mining Oligarchy", *US Institute of Peace*, (January 2015), hlm. 1-14

		Politik dan Perlawanan Sosial di Bangkalan Madura	tingkat pemerintahan? Seperti apakah tipe yang dikembangkan oleh orang kuat lokal sehingga menimbulkan perlawanan sosial ?	dan fenomenologi	kuat lokal (Kiai) yang sebelumnya termarginalkan dalam konteks pemerintahan mengambil peran sebagai pemimpin daerah. Kharisma religius yang melekat pada orang kuat lokal (Kiai) dijadikan modal politik identitas dalam kontestasi demokrasi elektoral yang pada akhirnya membentuk tatanan pemerintahan yang oligarkis. Adapun tipe yang dikembangkan dalam tatanan birokrasinya yaitu suatu pemerintah yang kliptokratif repesif sehingga perlahan-lahan atas kesadaran masyarakat memaknai demokrasi maka timbullah perlawanan sosial. ²⁵
--	--	---	--	------------------	--

E. Kerangka Teori

Fikih *siyāsah* merupakan kajian yang membahas secara kompleks tentang segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara *syari'ah* dengan tujuan menghendaki kemaslahatan dan menolak kerusakan. Sederhananya fikih *siyāsah* membahas tentang bagaimana mengatur hubungan rakyat dan pemerintahan sebagai pemangku kebijakan yang dituntut untuk sesuai dengan prinsip syari'at Islam yang banyak menjelaskan sistem nilai dalam hidup berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup kajian *siyāsah* atau politik juga membahas tentang apa dan bagaimana membangun politik hukum dalam suatu negara yang diharapkan mampu membawa kemaslahatan terhadap rakyat yang dipimpinnya. Oleh sebab itu maka eksistensi oligarki yang merupakan representasi kekuasaan minoritas berbasis kekayaan material sangat menarik

²⁵ Abdur Rozaki, "Islam, demokrasi dan orang kuat lokal: Studi Kemunculan Oligarki Politik Dan Perlawanan Sosial di Bangkalan Madura", Disertasi program doktor UIN Sunan Kalijaga (2015).

untuk dilihat dari perspektif *siyāsah idāriyah* yang memiliki arti politik administrasi ataupun pelayanan pemerintah terhadap rakyatnya berdasarkan dalil-dalil hukum Islam yang meliputi hak dan tanggung jawab secara sosial politik. Dalam suatu teori *siyāsah idāriyah* menjelaskan persoalan-persoalan bagaimana pelayanan pemerintah dijalankan sesuai dengan ketentuan sumber hukum Islam (syariat Islam) kerana, “pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama”.²⁶ Salah satu *qawā'idul fiqhiyyah* menjelaskan bahwa kebijakan penguasa harus diarahkan pada kebahagiaan ummat

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Berdasarkan *qawā'idul fiqhiyyah* diatas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pemimpin atau pemerintah diadakan untuk menciptakan keselamatan hidup ataupun kebahagiaan atas rakyatnya begitu pula proses politik yang diadakan semata-mata atas dasar kesadaran hidup untuk menciptakan keharmonisan sosial. Maka makna pemimpin tidak berhenti pada artikulasi individual namun lebih luas dari pada itu dalam konteks bernegara bahwa pemimpin dapat diletakkan pada komunitas administratif dan komunitas politik.

Untuk mempertajam pembahasan eksistensi oligarki politik dalam konsep negara demokrasi akan dibahas juga tentang *maqāsyid as-syari'ah* yang memberikan keterangan-keterangan dalam melakukan tindakan politik yang sesuai dengan maksud syari'at begitu juga konsep *hifzu al-ummah*. Sebagaimana diketahui, terdapat lima *maqāsyid asy-syariah* yang telah dikemukakan oleh ulama, yaitu: *hifzu al-din*, *hifzu al-*

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyāsah: Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 121

*nafs, hifzu al- 'aql, hifzu al-mal, dan hifzu al-nasl.*²⁷ Sehingga segala urusan baik proses politik maupun legislasi hukum harus berorientasi menjaga lima eksistensi *maqāsyid asy-syari'ah* yang nantinya juga menyentuh pembahasan tingkatan kebutuhan manusia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait konsep ummah, walaupun tidak termuat dalam lima *maqāsyid asy-syariah* namun sejatinya *hifzu al-ummah* menurut H.A Djazuli merupakan bagian dari *maqāsyid asy-syari'ah*²⁸ dalam konteks politik berbangsa dan bernegara, sebab lima pokok tujuan syari'at tersebut merupakan ungkapan dan artikulasi individual yang sekaligus bagian dari *maqāsyid asy-syari'ah* dalam konteks politik berbangsa dan bernegara.

Adapun teori etika politik Islam yang dijelaskan oleh Ayi Sofyan juga memberikan kritik dan pengujian etika dalam politik praktis yang diimplementasikan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam aspek teori etika politik Islam yaitu membahas dan memberikan masukan tentang bagaimana hakekat manusia bersikap dengan manusia lainnya dalam menata kehidupan bersama baik sebagai warga negara maupaun sebagai manusia pada umumnya berdasarkan ajaran syariat Islam. Dalam firman Allah SWT. disebutkan bahwa seorang pemimpin dibebani dengan amanah,²⁹ sehingga hal itu menuntut tanggung jawab untuk menghantarkan kebahagiaan ummat dalam konteks bernegara, sehingga proses politik harus terbebas dari kepentingan-kepentingan pragmatis dengan mengedepankan beban moral dalam segala kegiatan politik. Etika Islam adalah nilai akhlak (*akhlaq siyasi*) atau prinsip moral berlandaskan Al-Qur'an dan sunah, baik dan buruknya atau benar dan salahnya suatu perbuatan ditentukan oleh Allah swt.³⁰ Dengan demikian kiranya teori fikih *siyāsash* dalam ruang

²⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al- muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Maktabah Tijariyah, tt., hlm. 71-77.

²⁸ Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. hlm. 257

²⁹ *ṣad* (38):26

³⁰ Ayi sofyan, *Etika Politik Islam* (Bandung,:CV Pustaka Setia, 2012), hlm.56

lingkup *siyāsah idāriyah*, dan etika politik Islam cukup relevan untuk membahas eksistensi oligarki politik dalam negara demokrasi.

F. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah tentunya memerlukan metode ataupun cara dalam memperoleh jawaban-jawaban atau informasi dalam upaya pembahasan di dalam suatu penelitian, oleh sebab itu maka terdapat beberapa hal terkait metode penelitian dalam tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan menggunakan referensi ilmiah sebagai jawaban atas rumusan permasalahan. Sumber dan data yang didapatkan kemudian dikaji secara fokus dengan memiliki keterkaitan atas topik penelitian sehingga prinsip dari penelitian ini terbebas dari aspek penggalian informasi di lapangan. Segala informasi yang bernuansa fenomenologis dalam penelitian ini didapatkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga letak penelitian ini mencoba menjelaskan perspektif normatif terkait oligarki politik dalam konsep negara demokrasi dalam pandangan etika politik dan fikih *siyāsah*

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah eksplanatif yang mencoba menjelaskan pandangan konsep teoritis dalam kajian fikih *siyāsah* terhadap eksistensi oligarki dalam konteks negara demokrasi yang terjadi di tingkat lokal. Penelitian eksplanatif baru dapat dilakukan apabila informasi-informasi tentang masalah yang diteliti sudah cukup banyak, artinya telah ada beberapa teori tertentu dan telah ada berbagai

penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesis tertentu.³¹ Maka penelitian ini merupakan penguatan serta tambahan terhadap salah satu penelitian yang berkenaan dengan kekuasaan oligarki yang terjadi di tingkat lokal.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang nantinya dihadapkan dengan suatu perspektif normatif dalam fikih *siyāsah* dalam rang lingkup kehidupan bernegara. Pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono (29;2009) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Maka dalam penelitian kali ini akan dideskripsikan potret oligarki dalam negara demokrasi pada tingkat lokal yang kemudian dilihat dan dikaji kedalam suatu perspektif normatif (fikih *siyāsah*).

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan hadis sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, tesis, disertasi ataupun informasi ilmiah lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan validitasnya dengan mempunyai keterkaitan dalam pokok penelitian. Data primer seperti halnya Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber utama dalam mengeksplorasi persoalan eksistensi oligarki politik dalam konteks negara demokrasi perspektif fikih *siyāsah* sedangkan data sekunder diletakkan sebagai aspek pendukung yang menopang pokok penelitian ini.

³¹ Faizar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), hm.15

5. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perespektif kualitatif. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data diawali dengan proses pengumpulan data yang didapat dari berbagai macam sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian untuk kemudian direkonstruksi secara teratur sehingga mampu menjadi suatu kalimat yang logis dan mudah dipahami. Setelah menjadi suatu gagasan argumentatif kemudian dilakukan upaya elaborasi dan sistematisasi dengan teknik induktif yang meletakkan jawaban atas permasalahan penelitian di akhir suatu pembahasan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan sangatlah penting untuk dapat dengan mudah diketahui susunan bagian-bagian tesis. Maka dalam penyajiannya tersusun sebagai berikut :

Pertama, berisikan latar belakang dengan menjelaskan landasan akademik terkait alasan pemilihan judul penelitian setelah itu perumusan masalah yang akan diteliti, kemudian membahas tujuan, kegunaan dan manfaat penelitian sekaligus menguraikan metode atau langkah-langkah melakukan penelitian serta telaah pustaka yang dimaksudkan untuk mengetahui letak kesamaan dan perbedaan penelitian dan terakhir adalah sistematika pembahasan yang kesemuanya dimuat dalam satu bab pendahuluan.

Kedua, menjelaskan secara komperhensif terkait teori yang akan digunakan dalam penelitian, adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori etika politik Islam dan fikih *siyāṣah* dalam hal ini adalah *siyāṣah idāriyah* sebagai teori utama untuk menganalisis eksistensi oligarki politik dalam konteks negara demokrasi, untuk itu dalam hal ini akan dimuat dalam satu bab landasan teori.

Ketiga, berisi uraian mengenai data lapangan atau objek yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini berisikan pemaparan terkait eksistensi oligarki politik yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan kesemua paparan tersebut dimuat dalam satu bab hasil penelitian.

Keempat, berisikan analisis pembahasan tentang eksistensi oligarki politik dalam negara demokrasi perespektif fikih *siyāsah*, dalam hal ini nantinya akan diuraikan secara komprehensif terkait permasalahan yang nantinya akan disertai dengan jawaban, hal demikian akan diletakkan pada satu bab pembahasan.

Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulisan tesis yang disertai dengan daftar pustaka sebagai referensi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam melakukan penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Oligarki cenderung merusak bahkan mengkaburkan arti demokrasi sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Berdasarkan beberapa potret oligarki di beberapa daerah tersebut tampak sekali bahwa demokrasi tidak cukup kuat mempertahankan substansi sistem pemerintahan sehingga demokrasi terjebak dalam abstraksi prosedural. Adapun eksistensi oligarki sangatlah beragam seperti halnya oligarki di Bangkalan Madura, tampak pada pemerintahan yang sangat dekat dengan oligarki sultanistik. Keadaan semacam ini memperlihatkan bagaimana posisi kepala daerah (bupati) tampil sebagai aktor oligarki yang menguasai dan mengendalikan ruang politik sehingga tidak jarang eksistensinya tidak mudah dikalahkan oleh sistem hukum tertentu bahkan sistem demokrasi cenderung dibangun dan dilukiskan sebagai bahan formal yang secara substansi kebijakannya seakan berlawanan.

Potret yang lainnya terlihat banyak kemiripan yang benuansa oligarki sipil sebagaimana potret oligarki di kabupaten Karawang, Wakatobi dan Tasikmalaya, yang kesemuanya bermuara pada upaya mempertahankan kekayaan material yang disinyalir oleh oligark (pengusaha) yang secara umum tampil sebagai penguasa maupun eksis di luar instirusi formal. Hal semacam ini dapat dikatagorikan sebagai tipe oligarki sipil yang secara tidak langsung para oligark sebagian tampil sebagai elite penentu ataupun sebagai suatu subjek pendukung yang berujung pada relasi politik balas jasa. Adapun oligark dan oligarki banyak ditemukan dalam kontestasi politik dengan ciri khasnya yaitu menjadikan politik bersendikan nafas kapitalis yang berjalan diatas politik patron klien sehingga tidak jarang kekerasan dan perampasan dilakukan dengan legitmasi norma hukum dan pengkaburan arah kebijakan politik yang pro terhadap seseorang

ataupun kelompok tertentu. Oligark dan oligarki cenderung menggeser norma dan nilai politik yang tampak membuka akses rente dalam pemerintahan sehingga nilai politik tidak mencerminkan sebagai sarana mendukung demokrasi namun justru cenderung berpihak kepada para oligark untuk oligarki.

2. Adapun prekpektif fikih *siyāsah* melihat potret oligarki politik tersebut memberikan pandangan bahwa adanya kekuasaan bukan untuk membawa kemaslahatan pribadi ataupun golongan tertentu. Dalam fikih *siyāsah* pemerintahan diletakkan tidak lain hanya sebagai sarana menggapai kemaslahatan hidup bersama sebagai suatu bangsa dan negara, sehingga pemaknaan tentang kekuasaan bukan paham untuk bertindak bebas namun ruang untuk mengabdikan terhadap rakyat untuk membela hak-hak dasar rakyat dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan. Maka kebijakan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin harus mengedepankan kepentingan masyarakat luas dalam melayani urusan rakyat. Sehingga dalam lapangan politik seorang pemimpin harus mengacu pada pemeliharaan ummat yang diaktualisasikan dengan rasa penuh kasih dan tolong menolong untuk menggapai manfaat dan menolak apapun yang membahayakan. Adapun cara-cara seperti halnya money politik, jual beli jabatan ataupun hal lain yang cenderung menampilkan pemerintahan pragmatis merupakan hal yang berbanding jauh dalam perespektif *siyāsah* sehingga perlindungan, persamaan hak dan keadilan merupakan ketentuan dan sesuatu yang diharapkan oleh karena tujuan utamanya adalah mengantarkan ummat pada kebahagiaan dalam arti luas. Adapun pelayanan publik dalam perespektif *siyāsah* berorientasi tidak hanya untuk memberikan pelayanan yang baik akan tetapi bertindak untuk mencari sesuatu yang lebih baik sehingga setiap individu yang mempunyai tugas dan wewenang dalam birokrasi pemerintahan harus memiliki kometmen untuk saling

membantu satu sama lain dan harus melepaskan kepentingan-kepentingan yang dapat memicu ketidakadilan dan kesengsaraan. Bila pemangku kebijakan dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama memiliki nilai kemudhorotan maka ketentuan yang hendak diambil yaitu dengan cara memilih kadar dampak keburukan yang lebih ringan, begitupun halnya menolak kerusakan lebih utama dari pada mendirikan suatu kabaikan. Pada intinya dalam perspektif fikih *siyāsah* suatu tindakan politik statusnya diperbolehkan sejauh tidak berlawanan ataupun menghambat tujuan kemaslahatan masyarakat dengan batasan dan ketentuan syari'at Islam.

Dalam hal etika politik Islam bahwa prinsip politik yang sesuai dengan syariat yaitu suatu ruang politik yang mencerminkan pemenuhan hak dan kewajiban yang sama-sama seimbang. Sehingga etika politik Islam digariskan dan diikat dengan dasar politik yang bersendikan *rahmatan lil 'alamin* dengan prinsip konsisten terhadap advokasi ummat untuk kemaslahatan sosial. Sikap lemah lembut, bijaksana, sabar dan tabah yang merupakan bagian dari garis etika politik Islam merupakan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan dalam setiap pemimpin. Sehingga etika yang ditanamkan dalam setiap pemangku kebijakan yaitu anggapan dan paradigma ambisi kekuasaan adalah sesuatu yang tabu dengan tetap memelihara keseimbangan dalam pola hubungan rakyat dan pemimpin. Adapun dalam konteks hak dan kewajiban yang berwawasan kemaslahatan maka sikap pemimpin yaitu bertindak sebagai abdi rakyat yang menuntut segala tindakan berorientasi pada kesejahteraan rakyat disamping rasa tanggung jawab sebagai pemimpin dalam konteks melindungi harta benda rakyat, larangan harta benda yang beredar pada orang kaya saja, memberikan persamaan hak dan melaksanakan hukum Allah merupakan suatu keharusan sebagai penguasa dalam suatu negara.

B. Saran

Berdasarkan beberapa potret oligarki politik di daerah-daerah di tingkat lokal dalam konsep negara demokrasi maka perlu adanya pembenahan dalam lembaga berokrasi yang lebih kuat untuk meminimalisir dan mengendalikan praktik oligarki dalam pemerinatahan. Selanjutnya eksistensi hukum harus lebih menekankan pada aspek supremasi hukum secara substansif baik dilihat dari konteks materi hukum maupun penegakaannya. Lemahnya penegakan dan materi hukum yang tegas berimplikasi pada akses politik oligarki yang akhirnya bertransformasi menjadi oligarki politik atau oligarki pemerintahan. Tentunya tidak hanya itu dalam hal lain maka profesionalitas sebagai seorang pemimpin dalam tiga garis (legislatif, eksekutif, yudikatif) dan para politisi harus memiliki kesadaran dan pemahaman mendalam tentang arti demokrasi dan kemaslahatan masyarakat. Kesadaran pemimpin termanifestasikan dalam kebijakan yang dilakukan dengan membawa kemaslahatan, di satu sisi rakyat mendukung atas segala kebijakan pemimpin dengan penuh kesadaran. Adapun saran maupun kritik untuk pemimpin dapat disampaikan dengan mengacu pada prinsip etika yang menitik beratkan pada aspek pergaulan hidup yang baik (*wasāwirhum billati hiya ahsan*).

Tampaknya segala perangkat demokrasi seakan belum cukup untuk memendong eksistensi oligarki politik dalam suatu negara sehingga perlu kehadiran etika dalam politik oleh karena semangat moralitas politik merupakan refleksi yang berangkat dan dibangun dari jiwa seorang pemimpin. Dalam hal ini maka etika diletakkan sebagai sesuatu yang diharapkan mampu merubah sifat karakter pemimpin, politisi dan bahkan masyarakat secara umum yang cenderung pragmatis ke arah mental yang memiliki integritas sebagai seorang pemimpin, politisi dan rakyat sejati, semuanya diharapkan bekerja dan mendukung satu sama lain dalam bingkai hak dan kewajibannya masing-

masing. Kesadaran etika sangat penting bagi setiap individu dalam merajut semangat berbangsa dan bernegara oleh karena kesewenang-wenangan yang terjadi sebagaimana potret oligarki tersebut seakan memunculkan pernyataan tentang lemahnya etika seorang pemimpin dan para politisi dalam merawat politik di suatu negara.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Lubuk Agung, 1989.

Salim, Delmus Purneri, "Politik Islam Dalam Al-Qur'an: Tafsir Siyasah Surat Ali Imran Ayat 159", *Aqlam*, Vol. 1 Nomor 1 Juni 2016. Pp. 43-52.

Hadis

Asqalani, Al, Ibnu Hajar, *Bulūghul Marām*, alih bahasa M. Maftuhin Sholeh an-Nadwi dan Muhammad Husein Muqoffi, Surabaya: al-Hidayah, tt.

Nawawi, An, Imam, *Riyadhus Shalihin*, alih bahasa Muslich Shabir, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004).

Fikih

Anshori, Abdul Hamid Ismail, *al-Syura Wa Asaruha Fi al-Demokratiyah*, (Kairo, al-Mathba'ah al-Salafiyyah, 1980).

Ash-Shiddieqy, T.M Habsi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: CV Mulya, 1967).

Anzaikhan, M, "Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam", *Al-Ijtima`I-International Journal of Government and Social Science*, Vol 5 nomor 1 Oktober 2019. Pp. 57-80.

Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi, *al-'Asri*, (Surabaya: Multikarya Grafika, tanpa tahun)

Balkiah, Dra dan Maftuh, Ahnan, *Kamus Al-Munir*, (Surabaya, Anugerah, 1991).

Djazuli, H.A, *Ilmu Fikih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. ke-7 (Jakarta, Kencana, 2010).

_____, *Fiqih Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-5, (Jakarta, Kencana, 2013).

Dahlan, Azis, dan Abduh, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).

Januri, Moh Fauzan, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

Kamil, Syukron, *Islam dan Demokrasi Telaah Konseptual dan Hisrotis*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002)

- Kamsi, H, *Pergolakan Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Calpulis, 2016).
- Mawardi, Al, *al Ahkām as-Sultanniyah Wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, (Mesir: Dār al Fikr, 1996).
- Muhajir, Afifuddin, *Fiqh Tata Negara* (Yogyakarta, IRCiSoD, 2017).
- Mu'allim, Amir, "Maslahah Mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum*. Vol. 10 Nomor 24 September 2003. Pp. 12-43
- Mansyur, Ibn, *Lisān al- 'Arab*, Juz 6, (Bairut, Dar al-Shadr, 1968).
- Nabrawi, Al, Fathiyah *Tarikh al-Nuzhūm wa al-Haḍarah al-Islāmiyah*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Jadidah, tt).
- Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Ramadhan, Syamsuddin, *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*, (Jakarta: Panjimas 2003).
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, Cet. Ke-1 (Bandung, Pustaka, 1984).
- Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Siyāsah: Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Syarifuddin, Amir, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, (Padang, Angkasa Raya, 1990).
- Sofyan, Ayi, *Etika Politik Islam*, (Bandung, CV Pustka Setia, 2012).
- Taimiyah, Ibnu, *Siyāsah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, penerjemah Rofi' Munawwar (Surabaya, Risalah Gusti, 2005).
- Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi Dan Khomeini*, (Bandung: Mizan, 2002).
- Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Pemerintahan Islam*, Cet Ke-1 (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2019).

Uşul Fikih

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasyid Al-Syaria'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Dedi, Syahrial, “Perluasan Teori Maqashid Al-Syari’ah: Kaji Ulang Wacana Hifdz Al-‘Ummah A. Djuzuli”, *Al Istinbath*, Vol. 1 Nomor 4 Januari 2016. Pp. 46-61

Maimunah, “Politik Islam Perspektif Maqashid Syariah”, *El-Maslahah*, Vol. 8 Nomor 1 Juni 2018. Pp.16-29.

Nadwi, Al, Ali Ahmad, *al-Qawā’idu al-Fiqhiyah*, (Damaskus, Dār al-Qalam, 1994).

Qabtahi, Al dan Abduh, Muhammad, *Ushūl al-Idāriyah asy-Sayar’iyah*, Cet. Ke-1, (Bayt ats-Tsaqifah, 2003).

Qorib, Muhammad dan Zaini, Mohammad, *Integrasi Etika Dan Moral: Spirit dan Kedudukannya dalam Pendidikan Islam*, Cet, Ke-1 (Yogyakarta, Bildung Nusantara, 2020).

Syatibi, Al, Abu Ishaq, *al- Muwafaqāt fi Ushūl al-Syariah*, (Maktabah Tijariyah, tt).

Hukum

Faizar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010).

Hakim, Muhammad Zulfan dan Fajlurrahman, “Immature Politicians and Oligarchy As a Threat to Democracy”, *Fiat Justitia*, Vol 11 Nomor 4 December 2017. Pp. 342-354.

MD, Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet-7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

Nasution, Bahder Johan, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, *Yustisia*, Vol. 3 Mei 2014. Pp. 188-130

Soehino, *Hukum Tata Negara: Sumber-Sumber Hukum Tatanegara Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2005)

Taşawuf

Anwar, Rosihon, *Ahklak Tasawuf*, Cet. Ke-10, (Bandung, Pustaka Setia, 2010).

Amin, Ahmad, *Etika: Ilmu Akhlak*, Terj, Farid Ma’ruf, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

Ghazali, Al, *Ihyā’ ‘Ulūmu al Dīn*, Jilid III, (Beirut: Dār Al-Ma’rifah, th).

Ya’qub, Hamzah, *Etika Islam Pembinaan Akhlaqul Karimah*, (Bandung: Diponegoro, 1996).

Politik

- Aspinal, Edward dan Berenschot, Ward, *Democracy For Sale, Pemilu, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia*, alih bahasa Edisius Riyadi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019).
- Ali Andrias, Mohammad “Oligarki dan Praktik Rent Seeking Pasca Pemekaran Tasikmalaya”, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol 5::1 (Mei 2019). pp. 43-79
- Ananta, Dicky Dwi, “Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014”, *Jurnal Politik*, Vol 2 Nomor 1 Agustus 2016. Pp. 102-135.
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Integritas Bangsa*, Cet. Ke-3, (Jakarta, Renaisan, 2008).
- Bolqiah, Luthfi Hasanah, dan Raffiuddin, Riady, “Dominasi Oligarki dalam Pembangunan Reklamasi Pantai Utara Jakarta”, *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, Vol. 8 Nomor1 Juni 2021. Pp.13-25.
- Dwiyanto, Agus, (ed), *Mewujudkan Good Governace Melalui Pelayanan Publik*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2005).
- Drachon, Hugo “Robert Michels: The Iron Law Of Oligarchy And Dynamic Democracy”, Constellations published by John Wiley & Sons Ltd, 2020.
- Febriani, Anita; Istanti, Dilla Janu; Wibowo, Ponco, “Batubara Di Kalimantan Timur (Relasi Pengusaha Menjadi Penguasa)”, *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, Vol 2 Nomor 2 Januari 2021. Pp. 117-128
- Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita: Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi Dan Kedaulatan Rakyat*, (Bandung: Segarsy, 2014).
- Hajad, Vellayati, “Oligark Sebagai Rent Seeker: Haruskah ?”, *Jurnal Public Policy*, Vol. 3 Nomor 1 November 2017. Pp. 27-37
- Hidayat, Endik, dan Prasetyo, Budi, “Runtuhnya Politik Oligarki Dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent Pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri”, *Jurnal Politik*, Vol. 1 Nomor 1 Agustus 2018. Pp.54-85
- Javed, Noorani, *Afghanistan’s Emerging Mining Oligarchy*, Special Report 358 : US Institute of Peace, January 2015
- Kumala, Fitri dkk., “Oligarki Dalam Demokrsari Indonesia Membuat Hukum Sulit di Tegakkan”, *Jurnal Syntax Fusion*, Vol. 1 Nomor 2 Februari 2021. Pp. 40-48
- Kuala Nugraha, Fajar, *Pemilukada: Menguatnya Politik Oligarki Lombok Timur Tahun 2013*.

- Kreuzer, Peter, "Oligarchy And The Provision Of Coercion", Peace Research Institute Frankfurt, 2011.
- Nge, Herri Junius, "Oligarki Partai politik Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah : Kasus Munculnya Calon Tunggal Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017", *Jurnal Academia Praja*, Vol. 1 Nomor 1 Februari 2018. Pp. 59-84.
- Rozaki, Abdur, "Islam, Demokrasi Dan Orang Kuat Lokal: Studi Kemunculan Oligarki Politik Dan Perlawanan Sosial Di Bangkalan Madura", Disertasi doktor UIN Sunan Kalijaga 2015.
- _____, Abdur, *Proceeding Of The 16th Annual International Conference On Islamic Studies (Aicis)*, IAIN Raden Intan Lampung, November 1-4, 2016.
- Redjo, Samugyo Ibnu, "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dinamika Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia", *Agregasi*, Vol 4 Nomor 1 januari 2016. Pp. 126 – 244.
- Suaib, Eka dkk., "Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu Dalam Pembangunan Perdesaan", *Jurnal Penelitian Politik (LIPI)*, Vol. 13 Nomor 2 Desember 2016. Pp. 167-191.
- Syawawi, Reza, "Memutus Oligarki Dan Klientelisme Dalam Sistem Politik Indonesia Melalui Pembaharuan Pengaturan Pendanaan Partai Politik Oleh Negara", *Legislasi Indonesia*, Vol 18 Nomor 1 Maret 2021. Pp. 139-152.
- Sunarso, "Demokrasi Di Indonesia: Konsep, Prospek, Dan Implementasinya", *Humanika*, Vol 10 Nomor 1 (2010).
- Senn, Peter R, *Social Science And Its Methods*, (Boston, Holbrook, 1971).
- Surya Saputra, Lukman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung, PT Surya Purna Inves, 2007).
- Schattsneider, *Party Government*, (New York, Farrar & Rimehart, 1942)..
- Sabon, Max Boli, dkk., *Ilmu Negara: Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1994).
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Cet. Ke-9, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018).
- Tjarsono, Idjang, "Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas", *Jurnal Transnasional*, Vol 4 Nomor 2 (Februari 2013.. Pp. 881-894

Ubaedillah, A dan Rozak, Abdul, *Pendidikan Kewarganegaraan Civil Education Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Cet. Ke-8, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media Group, 2015).

Wisnu HKP Notanagoro, *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia: IMF, World bank, WTO, Sumber Bencana Ekonomi Bangsa*, (Sekretariat Jenderal Gerakan Kebangsaan Rakyat Semesta, 2011).

Winters, Jeffrey, A, *Oligarki*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).

_____, Jeffrey, A, "Reflections On Oligarchy, Democracy, And The Rule Of Law In Indonesia," *a lecture presented at the open senate meeting on the occasion of the seventy-fifth anniversary of the gadjah mada university school of law*, 17 February 2021.

Zainal, Nur Aliyah dan Khaldun, Ibnu, "Local Strongman dan Kontestasi Politik: Studi Kasus Terhadap Kemenangan Fenomenal Aras Tammauni dan Muh. Amin Jasa Pada Pilkada Mamuju Tengah", *Jurnal Sulesana*, Vol. 1 Nomor 1 Januari 2017. Pp. 48-63

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Lain-Lain

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Cet. Ke-9, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012).

Hasanah, Siti, "Kondisi Hukum Tata Negara 2020: Surplus Oligarki, Defisit Demokrasi", *Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA)*, 28 Desember 2020.

Maharani, Dewi Karina, "Perbedaan sistem ekonomi kapital dengan sistem ekonomi Pancasila", *Portal Spada, Universitas Sebelas Maret*, 27 Agustus 2021.

<https://bpip.go.id/bpip/berita/1035/256/makna-pancasila-sebagai-pandangan-hidup-ketahui-isi-dari-kelima-butirnya.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila.

<https://www.kompasiana.com>